

Mitos Pusat Panutan

Meaning and Power in a Southeast Asian Realm karya Shelly Errington

Ian Caldwell

(1991) *Journal of Southeast Asian Studies* 22(1): 109-18. [Terjemahan oleh Nurhady Sirimorok.](#)

Meaning and Power (Princeton University Press, 1989) adalah suatu upaya merekonstruksi bangunan konseptual dan administratif sebuah kerajaan pra-kolonial di Sulawesi Selatan. Buku ini bersandar pada catatan-catatan orang dalam mengenai gagasan dan kepercayaan yang terbentuk atas dasar kesetiaan personal pada bekas *akkarungeng* Luwu, dan membentuk pengalaman politik lokal. Secara tradisional dianggap sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, Luwu terletak di ujung utara Teluk Bone, dengan ibukota di Ware', dekat Kota Palopo masa kini. Dulu, Luwu merupakan kerajaan kuat di Sulawesi Selatan, wilayah pengaruhnya merentang di sepanjang pesisir hingga ke Makassar di pantai barat Sulawesi Selatan. Pada abad ke 16, pengaruhnya digantikan oleh Kerajaan Bone di pantai timur, saat itu dalam proses ekspansi di bawah penguasa ke tiga yang ambisius, Kerrampelua'. Pada akhir abad 19, Luwu surut menjadi wilayah pedalaman yang tidak penting secara ekonomi, meski masih dihargai oleh tetangga-tetangganya karena keantikan keluarga penguasanya. Pada 1906, Belanda menguasai secara langsung kerajaan ini dan menurunkan penguasanya. Pada 1930-an, seorang keturunan dari penguasa terakhir didudukkan kembali di singgasana yang telah surut di Palopo. Hal ini dilakukan Belanda dalam upaya untuk menguasai Sulawesi Selatan melalui jabatan-jabatan yang lebih tradisional.

Tema pusat buku ini adalah 'makna "pusat" atau "pusar" dalam bentuk kehidupan politik dan cara "seseorang" dipandang dan diletakkan secara sosial di Luwu.' (hl. 3) Buku ini merupakan upaya untuk mensejajarkan kajian mengenai epistemologi lokal dengan kajian-kajian politik modern yang 'dianggap universal', '—misalnya, bahwa sifat "kekuasaan" atau aktor politik dipandang selalu memaksimalkan perhitungan.' (hl. 5)

Tujuan-tujuan ambisius ini berperan menyatukan sebuah teks yang dibagi menjadi tiga bagian, sebuah pendahuluan, delapan bab, sebuah 'komentar', tiga kesimpulan dan sebuah catatan penutup. Dalam pendahuluan, penulis membahas masalah-masalah dalam mengkaji sistem politik non-Barat dan menyajikan posisi teoritisnya. Bagian Pertama, 'Tanda-tanda geografis', menyampaikan bagaimana konsepsi manusia, rumah dan negara Luwu berdiri di atas pemahaman tentang pusar (Bugis, *posi*'), atau pusat-pusat, sebuah konsep penting dalam metafisika lokal. Pada Bagian Kedua, 'Tendensi sentrifugal', pemahaman lokal tentang *siri*' ('rasa malu, martabat') digunakan untuk menganalisa kompetisi antar-individu dengan posisi sosial setara, 'sebuah persaingan dengan konsekuensi sentrifugal yang senantiasa diganggu dan mengganggu geometri tatanan sosial' (hl. 139). Ini menyematkan kualitas dinamis pada Bagian Pertama yang lebih statis 'terpusat' pada Bagian Tiga, 'Struktur-struktur sentripetal' penulis mengulas gagasan tentang 'darah putih' (sebuah gagasan tentang kebangsawanan yang mirip dengan gagasan 'darah biru' di

Eropa) untuk menunjukkan bagaimana status ditampilkan dan dilestarikan dalam sebuah masyarakat kompetitif yang hierarkis. Sejak Bagian Tiga hingga akhir buku, tema-tema ini menjadi dasar bagi pembahasan terperinci mengenai struktur administratif dan penyokong konseptual kerajaan pra-kolonial Luwu.

Meaning and Power bukan hanya menarik bagi para peneliti antropologi tetapi juga sejarawan pra-kolonial Asia Tenggara. Para sejarawan yang mengkaji masyarakat-masyarakat non-Eropa telah mendapatkan pemahaman-pemahaman bermanfaat dari karya-karya para sarjana antropologi sosial. *Indigenous System of Western Malaya* karya Gullick, *Kerajaan* karya Milner, *Nagara and Commandery* karya Wheatley, dan *A Malay Frontier* karya Drakard hanya segelintir dari kajian historis yang terbit tentang Asia Tenggara yang menimba gagasan dari penelitian antropologis. Pada saat bersamaan, kajian-kajian etnografis yang dihormati, semisal *Harvest of the Palm* karya Fox dan *World Conqueror dan World Renoncer* karya Tambiah,¹ menunjukkan manfaat catatan-catatan historis, baik tertulis maupun lisan, untuk memahami sebuah masyarakat pada masa kini. Antropologi dan sejarah semakin mendekat, kompetensi pada satu disiplin kian membutuhkan kemampuan membaca dan memahami diskursus disiplin yang lain.

Sebuah fenomena baru muncul, kajian para peneliti antropologi mencoba menjelaskan masa lalu sekaligus masa kini. Contoh yang terkenal ialah *Negara* karya Geertz² yang mencoba merekonstruksi organisasi sosial dan politik pra-kolonial Bali pada akhir abad 19. Buku ini tampaknya menginspirasi penulisan *Meaning and Power*, melihat dari kesamaan tujuan untuk menjelaskan struktur politik Luwu pra-kolonial, dan pengakuan penulis sendiri akan utang intelektualnya kepada Clifford Geertz. (hl. x) Tema utama *Negara* ialah apa yang disebut Geertz sebagai 'mitos pusat panutan' (*exemplary center*). Gagasan ini menganggap bahwa otoritas politis negara-negara pra-kolonial Indonesia tidak bergantung kepada kemampuan mengadakan perang, tetapi pada kemampuan negara mengadakan upacara-upacara besar dan mengesankan. Geertz menulis tentang Bali:

Sereonialisme istana merupakan tenaga penggerak bagi politik istana; dan ritual massal bukanlah alat untuk menopang negara, tetapi negara ... merupakan alat untuk menampilkan ritual massa. Kekuasaan melayani pertunjukan, bukan [pertunjukan] menandakan kekuasaan.

¹ Gullick, J.M., *Indigenous System of Western Malaya* (London: Athlone Press, 1958); Milner, A.C., *Kerajaan: Malay Political Organization on the Eve of Colonial Rule* (Tucson: University of Arizona Press, 1982); Wheatley, P., *Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian Urban Traditions* (Chicago: University of Chicago, 1983); Drakard, J., *A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom* (Ithaca: Southeast Asian Program, Cornell University, 1990); Fox, J.J., *Harvest of the Palm: Ecological Change in Eastern Indonesia* (Cambridge Mass.: Harvard University Press); Tambiah, S.J., *World Conqueror dan World Renoncer: A Study of Buddhism and polity in Thailand Against a Historical Background* (Cambridge: Cambridge Universty Press, 1976).

² Geertz, C., *Negara: The Theater State in Nineteenth-Century Bali* (Princeton: Princeton University Press 1980).

Dia melanjutkan:

Di balik itu, bagi kita, keanehan hubungan terbalik antara muatan dan penanda-penanda kekuasaan terletak pada sebuah konsepsi umum tentang alam dan dasar kedaulatan yang sederhananya, dapat kita sebut sebagai doktrin pusat panutan. Ini merupakan teori bahwa istana-dan-ibu kota secara bersamaan adalah mikrokosmos dari tatanan supranatural—“sebuah gambaran akan ... jagad raya dalam skala kecil”—dan perwujudan bendawi dari tatanan politik. Dia bukan sekadar inti, mesin atau penggerak negara, tetapi negara itu sendiri.³

Gagasan tentang pusat panutan—anggapan bahwa otoritas politik hadir untuk melayani religi dan ritual, bukan sebaliknya—mewarnai *Meaning and Power*. (Lihat Indeks, ‘centers’) Menurut penulis, Luwu tergabung dalam wilayah kultural yang membentang antara Luzon, Bali, Maluku dan Semenanjung Malaya, sebuah wilayah yang dia anggap sebagai ‘Kepulauan Sentris’ (hl. 207-16) Wilayah ini berlawanan dengan Indonesia Timur (Seram, Ambon, dan Nusa Tenggara), di mana gagasan tentang ‘dualitas’ lebih penting daripada ‘pusat’. Gagasan-gagasan tentang Luwu masa pra-kolonial inilah, dan bukan sekadar struktur administratif sehari-hari, yang ingin diuraikan oleh penulis. Pendekatan berani dan imajinatif ini hendak dirayakan. Banyak yang dapat dipelajari tentang masa lalu pra-kolonial Indonesia dari perspektif antropologis, bila penelitian tersebut dituntun oleh metode yang diakui dalam menguji dan menghimpun bukti yang dikembangkan dalam penelitian sejarah.

Sayangnya, *Meaning and Power* tidak mengikuti metode-metode tersebut. Sebagai hasilnya, karya ini punya tiga kelemahan serius. Ketiga kelemahan ini memunculkan pertanyaan tentang validitas ulasan penulis mengenai konsep ‘manusia’, ‘tempat’ dan ‘kesaktian’ lokal, yang disusun dari percakapan dengan para informan, dan kegunaan deretan konsep ini sebagai alat untuk memahami hierarki politik Luwu masa pra-kolonial. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah: (1) terbatasnya sumber yang menjadi dasar penarikan kesimpulan (2) asumsi keliru bahwa Luwu adalah negara yang mengalami Indianisasi, dan (3) ketidakmampuan model organisasi politik ‘mandala’ yang digunakan penulis untuk menafsir datanya. Mari kita lihat tiga poin ini satu per satu.

Sebuah pertanyaan tentang sumber

Sebagian besar informan penulis adalah keturunan dan kerabat dari mantan keluarga penguasa Luwu, salah satunya selama beberapa tahun menjabat perdana menteri (Opu Pa’Bicara) ‘kerajaan’ yang dipulihkan Belanda pada 1930an. Almarhum Opu Pa’Bicara digambarkan sebagai ‘sosok yang dikenal oleh para peneliti dari Indonesia, Eropa, Amerika dan Australia’ (hl. 22) dan kecerdasannya yang tersamar bisa tampak dari percakapan dengan penulis. Informan lain adalah Andi Anthon, seorang penafsir budaya Bugis yang terkenal, juga bekerja bersama para peneliti antropologi lain. (Andi adalah gelar bangsawan Bugis.) Jelas bahwa para informan penulis sangat berpengetahuan dan artikulatif. Tetapi untuk merekonstruksi ‘pemerintahan tradisional’ berdasarkan konsep hierarki dan otoritas lokal, penulis diharapkan mewawancarai orang dari berbagai tingkatan di

³ *Negara*, hl. 13

masyarakat, untuk menyajikan pandangan yang seimbang mengenai gagasan dan kesetiaan yang dijelaskan penulis. Tetapi penulis mengakui pada halaman 22: 'Akan menjadi jelas bahwa pandangan budaya yang saya dapatkan merupakan pandangan dari atas, *dan sebagian besar orang dari kalangan menengah dan bawah yang saya temui sangat menghormati tatanan lama* [cetak miring saya]. Lebih jauh, di halaman berikutnya kita diberitahu bahwa 'dalam lingkaran di mana saya bekerja, para warga desa merujuk pada masa lalu yang masih bisa diingat ketimbang masa depan yang dibayangkan sebagai pedoman bagi pola menjalani hidup.

Mudahnya mengabaikan kemungkinan tafsir lain kekuasaan dan hubungannya dengan epistimologi lokal ini jauh dari meyakinkan. Sejarah Luwu 40 tahun terakhir menyarankan bahwa orang Luwu non-bangsawan, yang membentuk lebih dari 90% populasi Luwu, sangat mungkin mempunyai visi akan diri dan masyarakat yang berbeda secara radikal. Antara 1950 dan 1965, Sulawesi Selatan diguncang pemberontakan, ribuan meninggal dan ribuan lagi mengungsi ke kota atau secara paksa dipindahkan ke pedalaman oleh para pemberontak. Banyak dari pertempuran berlangsung di Luwu. Pemberontakan itu, secara bertahap semakin beridentitas Islam, menghasilkan kemerosotan tajam praktik budaya tradisional dan semakin besarnya komitmen terhadap ajaran Islam. Penulis sendiri menyadari dampak pemberontakan ini terhadap masyarakat Luwu, karena dia menulis pada halaman 19: 'Wilayah pedesaan Luwu dekat lokasi penelitian lapangan saya benar-benar ditinggalkan ... sekolah dan pertanian terhenti samasekali, dan orang mengirim anak ke Ujung Pandang untuk tinggal bersama kerabat atau pelindung lain.'

Sejak 1966, Luwu menjadi kawasan terpencil di Sulawesi Selatan. Pembukaan tambang nikel terbesar dunia pada awal 1970-an mentransformasi ekonomi dan administrasinya. Antara 1970 dan 1980, penduduk Luwu berlipat ganda karena ribuan pendatang mengalir ke kawasan ini. Akan tetapi, selain segelintir komentar sebagai pendahuluan, dampak perubahan ini, yang seharusnya juga memengaruhi para informan bangsawan Errington dan cara mereka memandang dunia, nyaris tidak dipertimbangkan. Dalam kata-kata Opu Pa'Bicara: 'Masa akkarungeng dan datu sudah lewat Kesaktian telah hilang dari dunia.' (hl. 304)

Salah satu kelemahan sumber-sumber sejarah lokal Asia Tenggara adalah mereka nyaris selalu hadir sebagai pandangan elit terhadap kejadian tertentu. Para peneliti antropologi sebenarnya dapat menawarkan 'pandangan kalangan petani' atas dunia Asia Tenggara, sesuatu yang bermanfaat dan sering bersifat korektif. Apakah masyarakat awam Bugis atau Makassar menjelaskan kurangnya kekuasaan politik mereka dengan cara serupa dengan para pemimpin mereka, atau apakah ada skeptisisme tertentu terhadap gagasan 'kesaktian' dan 'darah putih'? (Gullick mencatat bahwa pada abad 19 di negara-negara pantai barat Malaya tidak ada bukti bahwa gagasan darah putih dipercaya secara serius: 'dia hanya menjadi bagian dari kepura-puraan lazim digunakan untuk mengekspresikan pemahaman akan martabat bangsawan'⁴) Seberapa pentingkah ancaman fisik atau retribusi ekonomis? Siapa yang mengendalikan pertanian dan perdagangan, dan apa hubungan material antara pemimpin dan pengikut? Apa yang ditawarkan *Meaning and Power* adalah sebuah ideologi elite, terpisah dari landasan ekonomi dan politiknya.

⁴ *Indigenous Political Systems*, hl. 45

Mengenai sumber, kritik ke dua adalah alpanya kepastakaan dasar mengenai Sulawesi Selatan dalam daftar kepastakaan buku ini. Banyak dari kealpaan ini adalah karya para sarjana Belanda: di antara 166 daftar yang disebutkan, hanya ada satu sumber berbahasa Belanda—sebuah katalog naskah. (*Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes* [Groningen, 1950] karya H. Th. Chabot, merupakan etnografi standar masyarakat Makassar dataran rendah, disebut dalam terjemahan Inggris.) Mengingat luasnya kepastakaan Belanda mengenai Sulawesi, termasuk sebuah artikel berharga sepanjang 57 halaman mengenai Luwu abad 19,⁵ perujukan penulis pada ‘tradisi panjang Belanda akan kerja teliti mengenai kawasan ini, yang dapat dijadikan landasan bagi peneliti masa kini’ (hl. x) tampaknya tak lebih dari sekadar basa-basi.

Pengabaian lain adalah disertasi Susan Millar yang dipertahankan di Cornell pada 1981⁶ (diterbitkan sebagai *Bugis Wedding; Rituals of Social Location in Modern Indonesia* pada 1989 oleh University of California). Kajian Millar menawarkan wawasan berharga tentang hubungan antara status dan kekuasaan politik yang membantu menerangkan (dan pada gilirannya dikonfirmasi oleh) catatan sejarah lokal Sulawesi Selatan. Sejauh mana kajian Errington mendukung tafsiran Millar tentang hubungan ini? Kita tidak diberi tahu. Kegagalan penulis menimbang kajian yang punya hubungan dekat (kita pasti berasumsi bahwa dia telah membacanya) tampak sangat aneh.

Sumber-sumber sejarah lokal, sangat kaya di Sulawesi Selatan, juga diabaikan, sebab penulis sendiri mengakui ketakampuannya membaca aksara Bugis (hl. 24). Namun beberapa sumber sejarah Bugis telah tersedia dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Oleh sumber-sumber ini Sulawesi Selatan digambarkan sebagai kerajaan-kerajaan yang agresif, gemar berperang untuk tujuan penaklukan atau mendominasi kawasan ini; sebuah gambaran yang berbeda dengan pemerintahan mistis yang memandang ke pusat sebagaimana dalam *Meaning and Power*, yang dengan baik hati mengabaikan kekuasaan ‘nyata’, yaitu kendali fisik atas orang dan tempat. Dengan melihat sekilas kajian Andaya tentang pemimpin perang Bugis abad ke 17, Arung Palakka,⁷ yang mencatat rentetan peperangan, perampokan dan pembunuhan, yang menunjukkan tabiat kehidupan politik, kita akan melihat bahwa kekuasaan lebih berdasar pada ancaman kekerasan nyata ketimbang konsep kesaktian dan ‘keterpusatan’.

Akan tetapi, ketidakmampuan penulis membaca sumber-sumber sejarah tidak mencegahnya berkomentar secara keliru mengenai sumber-sumber tersebut. Dia menelaah satu silsilah modern dan secara keliru menafsir keberurutan (linearitas) peletakan titimangsa sebagai rasionalisasi yang diimpor dari Barat (hl. 225). Di halaman 125 kita diberitahu bahwa catatan historis Bugis ‘mengabaikan proses politis’ pada saat sumber-sumber itu mencatat sejarah secara terperinci. Catatan silsilah dan kronik Bugis, yang dapat ditelusuri sampai awal abad 15 dan mengambil untung karena ditulis kalangan elit penguasa untuk tujuan pendidikan di kalangan sendiri, memperlihatkan kesadaran historis yang bersifat moderen dan menjadi alasan bagi penulisan

⁵ Braam Morris, D.F. van, *Het landschap Loewoe (Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen XXXII (1889) 497-530)*.

⁶ Millar, Susan Bolyard, ‘Bugis Society: Given by the Wedding Guest’, *Disertasi*, Cornell University, Ithaca, 1981).

⁷ Andaya, L.Y., *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in The Seventeenth Century* (The Hague: M. Nijhoff, 1981).

catatan-catatan sejarah tersebut. Tetapi mereka ditolak tanpa dibaca, dengan pernyataan bahwa 'motivasi lebih besar dari penulisan catatan-catatan ini utamanya bukanlah dorongan untuk membangun catatan sejarah', terlepas dari fakta bahwa 'kejadian-kejadian yang diceritakan [dalam sumber-sumber ini] "benar-benar terjadi" atau masuk akal bagi epistemologi Barat' (hl. 229-230). Pernyataan ini keliru sekaligus merendahkan. Kronik Gowa, misalnya, mencatat bahwa dia ditulis agar para pemimpin-pemimpin besar di masa lalu tidak dilupakan oleh keturunan mereka. Catatan ini menyuarakan kekhawatiran bahwa bila masa lalu dilupakan, generasi demi generasi di masa datang akan terlalu membanggakan diri, sementara orang asing akan memandang sepele orang Makassar.⁸

Apakah Luwu mengalami Indianisasi?

Di sepanjang buku ini, Luwu dirujuk sebagai negara 'Indik' (mengalami Indianisasi). Kita diberi tahu bahwa 'Gagasan yang mendasari tindakan politik di masyarakat-masyarakat ini [Bugis dan Makassar]—pencarian untuk menghimpun kesaktian yang diambil dari energi kosmik tak berbentuk, penghormatan atas warisan-warisan nenek moyang dalam bentuk benda pusaka negara, kekeramatan penguasa, pola mandala dalam pengorganisasian negara—dengan jelas menghubungkan mereka dengan 'Negara-Negara Indik' Bali, Jawa dan semenanjung Malayu' (hl. 14) Indianisasi Luwu adalah kebenaran yang membuktikan diri sendiri, yang menjadi dasar bagi negara yang direkonstruksi dalam *Meaning and Power*: seluruh gagasan di atas, dengan kemungkinan pengecualian pada gagasan ke dua, berasal dari India.⁹ Tetapi para peneliti sejarah mencatat rendahnya derajat pengaruh Indianisasi terhadap kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan.¹⁰ Penulis tidak mengajukan bukti apa pun mengenai Indianisasi Luwu, juga tidak menunjukkan kemawasan bahwa para sejarawan telah membantahnya. Mari kita lihat buktinya secara ringkas.

Coedès mendefinisikan Indianisasi sebagai ekspansi budaya terorganisir yang dibangun di atas konsepsi kebangsawanan India yang dicirikan oleh ajaran Hindu atau Buddhis, mitologi Puranas, kepatuhan akan teks-teks hukum India dan penggunaan bahasa Sansakerta. Transmisi tiga ciri pertama ini dilakukan dengan cara terakhir: 'Dengan alasan inilah kita kadang bicara tentang "Sansakertanisasi" ketimbang "Indianisasi"'.¹¹

Tidak satu pun dari ciri ini dapat ditunjukkan keberadaannya di Sulawesi Selatan. Satu ciri penting dalam konsepsi kebangsawanan India adalah gagasan *cakravartin*, 'penguasa semesta'. 'negara-negara *cakravartin* kerap kali dirujuk sebagai 'keseluruhan dunia', yaitu: membentang dari satu

⁸ Wolhoff, G.J. dan Abdurrahim (eds.), *Sedjarah Goa*, (Ujung Pandang: Yayasan Sulawesi Selatan dan Tenggara, t.t.), hl. 9.

⁹ Stutley, M. & J., *A Dictionary of Hinduism: Its Mythology, Folklore and Development 1500 B.C. - 1500 A.D.*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1977) hl. 260; Wolters. W.O., *History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1982), Bab 2.

¹⁰ Lihat, misalnya, Macknight, C.C., "The Emergence of Civilization in South Celebes and Elsewhere", in Reid, A. and L. Castles (eds.), *Pre-Colonial State Systems of Southeast Asia* (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of Royal Asiatic Society, 1975); Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Lain* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hl. 209.

¹¹ Coedès, G., *The Indianized States of Southeast Asia* (Canberra: Australian National University Press, 1986), hl. 15-16.

samudera ke yang lainnya, sebagaimana yang dikuasai kaisar Asoka.¹² Dalam kata-kata Errington: 'Dalam kontes antara dua sejawat di masyarakat sentris ini, semua hal menjadi taruhan; satu mencuat sebagai pemenang, sementara yang lain benar-benar takluk.' (hl. 74). Akan tetapi, catatan-catatan sejarah Sulawesi Selatan tidak menunjukkan ciri tersebut. Kerajaan-kerajaan dikalahkan dalam perang, tetapi keutuhan wilayah mereka, mungkin kecuali dengan penyesuaian kecil, tetap dihormati, dan sudah menjadi kebiasaan untuk memertahankan penguasa yang takluk atau anggota keluarga istana setempat sebagai penguasa bawahan.¹³ Singkatnya, kita tidak menemukan petunjuk kecil sekali pun akan sebuah filsafat politik yang berlandaskan pada 'gagasan kesatuan sosial dan kosmik, hukum dan ketertiban, [gagasan] "kesatuan fundamental yang melampaui sangat banyak keberagaman darah, warna, bahasa, pakaian, perilaku dan sekte."' ¹⁴

Tidak ada bukti akan sebuah pengetahuan di satu waktu pada masa lalu berasal dari Bahasa Sansakerta. Jumlah kata pinjaman Sansakerta dalam Bahasa Bugis cukup sedikit bila dibandingkan dengan Bahasa Malayu dan Jawa dan sebagian besar diperoleh lewat kontak dengan Bahasa Malayu.¹⁵ Ramayana, Mahabarata dan karya besar lain sastra India tidak diketahui di Sulawesi Selatan pra-kolonial. Tidak ada versi bahasa sehari-hari dari sastra dan filsafat India: sastra Bugis biasanya karya asli, atau terinspirasi Islam. Tidak ada bukti mitologi India dapat ditemukan dalam catatan silsilah maupun sejarah Bugis. Keluarga penguasa menjejaki asal muasal mereka dari *tomanurung* (mahluk yang turun dari dunia atas) mengikuti mitos asal-usul Austronesia yang tersebar luas.¹⁶ Gaya sastra India dengan penekanan pada mitos, legenda dan simbol juga tidak tercermin dalam tulisan kronik dan sejarah Sulawesi Selatan.¹⁷ Akhirnya, tidak ada bukti akan hukum India di Sulawesi Selatan, atau pengetahuan akan aturan-aturan tersebut. Mungkin, bukti paling kuat akan tipisnya pengaruh India adalah bahwa tulisan, sebuah prasyarat bagi penyebaran gagasan-gagasan India, tidak berkembang di Sulawesi Selatan sebelum kisaran tahun 1400, paling tidak seratus tahun setelah munculnya negara gabungan (*segmentary*) terbesar pertama.¹⁸

Sehingga, kesimpulan paling memungkinkan adalah Sulawesi Selatan tidak pernah mengalami Indianisasi secara harfiah. Sulawesi terletak di tepi wilayah pengaruh India, dan hanya menunjukkan 'jejak yang sangat kecil dari tradisi India yang sangat akrab di bagian lain Asia Tenggara.'¹⁹ Organisasi dan administrasi Luwu masa pra-kolonial pasti tidak bersandar pada pemikiran sosial dan politik Indik, melainkan 'Austronesia'. Karenanya, seharusnya kita mencari kategori pemikiran dari kompleks budaya masyarakat berpenutur Austronesia Barat, yang diyakini sebagai akar dari kelompok bahasa Sulawesi Selatan,²⁰ dan bukan dari pemikiran India kuna.

¹² Stutley, *Dictionary*, hl. 58

¹³ Andaya, *Heritage*, hl. 43

¹⁴ Stutley, *Dictionary*, hl. 58

¹⁵ Gonda, *Sanskrit in Indonesia* (Nagpur: International Academi of Indian Culture, 1952), hl. 38-45.

¹⁶ Ras, J.J., *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography* (The Hague, M. Nijhoff, 1968), Bab 4.

¹⁷ Noorduyn, J., "Origins of South Sulawesi Historical Writing", in Soedjatmoko *et al.* (eds.), *An Introduction to Indonesian Historical Writing* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hl. 137-138.

¹⁸ Caldwell, I.A., "Power, State and Society in Pre-Islamic South Sulawesi", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 151(3):394-421.

¹⁹ Macknight, "Emergence", hl. 129

²⁰ Bellwood, P., *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago* (Sydney: Academic Press, 1985), hl. 109

Setelah 1600, kompleks budaya ini dimodifikasi oleh Islam (agama negara Luwu selama nyaris 400 tahun!), sebuah pengaruh yang hampir tidak disebutkan di buku ini.

Kekeliruan penerapan model kuasa politik 'mandala'.

Setelah secara keliru mengasumsikan Luwu sebagai negara Indik (dan bukan sebagai negara Austronesia-Islam), penulis meneruskan dengan menjelaskan struktur dan dinamika politik Luwu menggunakan model 'mandala' yang terkenal dan berasal-India, dipopulerkan oleh Anderson dalam artikelnya, *'The idea of power in Javanese culture'*.²¹ Dalam artikel ini, dia mengandaikan pemerintahan tradisional Jawa dengan 'kerucut cahaya yang menerangi ke bawah dengan lampu pemantul ... cahaya lampu susut secara bertahap seiring menjauhnya jarak dari lampu, merupakan metafora tepat bagi konsepsi Jawa bukan hanya bagi struktur negara tetapi juga bagi hubungan pusat-pinggiran dan kedaulatan wilayah.'²² Artikel yang imajinatif dan menggugah ini dimaksudkan sebagai sebuah 'langkah awal menuju penelitian lebih lengkap mengenai kesalingkaitan antara budaya dan tindakan sosial di Indonesia'²³ namun kini cenderung menjadi ortodoksi baru. Di antara klaimnya yang paling banyak dipertanyakan ialah bahwa negara-negara yang terindianisasi tidak punya tapal batas. Bagi Errington, 'penyingkapan pemikiran politik tradisional Jawa yang mencerahkan dan kini menjadi klasik' (hl. 35) ini dapat diterima sebagai paradigmatis: 'Kini telah cukup luas diterima dalam kajian sejarah Asia Tenggara bahwa pusat-pusat politik lebih memerhatikan kendali atas rakyat ketimbang kendali atas wilayah. Perbatasan wilayah, khususnya, merupakan soal sepele.' (hl. 108)

Klaim lazim ini—bahwa negara-negara di Indonesia didefinisikan oleh pusat-pusat mereka, bukan perbatasan mereka—punya validitas tinggi di kawasan pesisir, kesultanan berpenutur Malayu di barat kepulauan Indonesia, di mana keseimbangan antara permintaan akan perdagangan dan perlindungan militer difasilitasi oleh beberapa ribu mil garis pantai, dengan ratusan muara sungai tempat ibukota berlokasi. Tetapi pertanian, bukan perdagangan, merupakan basis ekonomi dari sebagian besar kerajaan pedalaman Indonesia. Investasi tanah, dalam bentuk sawah beririgasi dan berteras, tentu tidak dapat diabaikan semudah ibukota pesisir melakukannya, dengan rumah bambu dan kayu serta populasi yang menghuni perahu. Tidak sulit melihat dalam catatan sejarah Sulawesi Selatan pemahaman wilayah yang terdefiniskan dengan jelas dan sulit diseimbangkan dengan gagasan negara mandala.

Salah satu pemahaman wilayah itu adalah keberadaan (*pace* Anderson) perbatasan politis. Klaim buku ini bahwa perbatasan-perbatasan Luwu adalah 'soal sepele' didasarkan pada sebuah anekdot yang dilekatkan kepada peneliti sejarah dan hukum Bali asal Belanda, V.E. Korn, dikutip dalam *Negara* karya Geertz.²⁴ Menyusul penguasaan mereka atas Sulawesi Selatan pada awal abad 20, Belanda berkehendak, demi alasan administratif, untuk menentukan batas antara dua 'kerajaan

²¹ Anderson, B.R.O'G., "The Idea of Power in Javanese Culture", in Holt, C. (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1972).

²² Anderson, "Power", hl. 22

²³ Anderson, "Power", hl. 2

²⁴ Geertz, *Negara*, hl. 24

kecil'. Mereka memanggil para bangsawan yang dimaksud dan menanyai letak perbatasan kerajaan mereka.

Keduanya sepakat bahwa perbatasan kerajaan A terletak di titik terjauh dari mana seseorang masih dapat melihat rawa, dan perbatasan kerajaan B terletak di titik terjauh dari mana seseorang dapat melihat laut. Dengan begitu, apakah mereka tidak pernah bertikai atas tanah antara, dari mana seorang tidak dapat melihat rawa atau laut? "Tuan," jawab salah satu bangsawan itu, "kami punya alasan-alasan yang jauh lebih baik untuk bertikai daripada perbukitan terlantar ini." [cetak miring saya.] (hl. 108-109)

Ironisnya, jelas dari anekdot ini bahwa kedua bangsawan itu tidak yakin akan perbatasan kerajaan tetangga masing-masing. Kekeliruan penulis (dan Geertz) berasal dari fakta bahwa terdapat kawasan tak bertuan yang disepakati secara tak terungkap oleh kedua pihak, berupa rawa yang tak dapat dikelola (serupa dengan kawasan gurun pasir yang merupakan tanah tak bertuan di antara perbatasan Iran dan Pakistan, atau Irak dan Yordania). Perbatasan serupa dapat ditemukan di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lain. Mungkin contoh paling baik adalah perbatasan Ajattappareng, sebuah koalisi lima pemerintahan yang terletak di dataran rendah subur di utara danau-danau tengah Sulawesi Selatan. Masing-masing pemerintahan ini—Sidenreng, Rappang, Sawitto, Suppa dan Alitta—berlokasi di kawasan dataran luas, dipisahkan oleh bukit-bukit rendah atau rentang kawasan perairan. Sebagaimana dalam 'kerajaan-kerajaan kecil' Korn, perbatasan wilayah membentang setidaknya di ujung tanah pertanian yang subur.

Bukti jelas bagi gambaran ini ditemukan dalam daftar kerajaan bawahan di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar merupakan negara perhimpunan (*segmentary*) terdiri dari sejumlah banua atau domain (Bugis *paliliq*) (seringkali berjumlah hingga lebih selusin), masing-masing diperintah oleh seorang *arung* (*chief*). Domain-domain ini juga terbentuk dari kampung-kampung atau permukiman, masing-masing dipimpin seorang kepala kampung. Daftar-daftar terperinci dari domain-domain ini dan desa-desa pembentuk mereka kini dapat kita temukan dalam tulisan-tulisan sejarah Bugis.²⁵ Daftar Domain Sidenreng, pemerintahan paling penting di antara lima pemerintahan Ajattappareng, disajikan pada halaman 37 dalam katalog manuskrip Bugis dan Makasar karya Matthes.²⁶ Daftar ini juga dapat dibaca sebagai peta administrasi politik pra-kolonial Sidenreng. Sebagaimana daftar-daftar lainnya, daftar ini dibagi dalam daftar domain, diikuti oleh desa-desa pembentuk mereka. Ini mencerminkan pemahaman teoritorial otoritas politis berdasarkan domain, desa-desa dan kawasan-kawasan yang berkaitan dengan mereka.

Sejarah Bugis menunjukkan dengan jelas bahwa wilayah dalam kerajaan-kerajaan pertanian bukan sesuatu yang 'tidak relevan', tetapi menjadi alasan bagi banyak perang berdarah untuk merebut kendali, bukan atas rawa-rawa, tetapi atas dataran aluvial subur yang ditanami padi dan menghasilkan sebagian besar kekayaan kerajaan. Macknight menunjukkan bagaimana sejak abad

²⁵ Caldwell, "Power"

²⁶ Matthes, B.F., *Kort verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en Boeginesche handschriften vooral die van net Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam* (Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1875).

ke 15, Kerajaan Bone melebar dari sehimpunan permukiman yang bersekutu hingga menjangkau keseluruhan dataran aluvial yang kini menyandang nama Bone. Para penguasa awal Bone tidak memulai menarik pengikut lewat ritual canggih (model 'pusat panutan'), melainkan lewat penaklukan wilayah secara militer.²⁷

Kegagalan penulis memahami pentingnya kewilayahan dan keberadaan perbatasan sebagian berasal dari kurangnya pengetahuannya tentang geografi politik Luwu. 'Wilayah utama di Luwu', menurutnya, 'ialah Bua', Ponrang dan Baebunta. Di bawah mereka ada kawasan-kawasan atau wilayah yang kurang penting, termasuk kawasan yang kini menjadi Tana Toraja, Sulawesi Tengah, dan bahkan di seberang Teluk Bone.' (hl. 125) Ini jelas keliru. Bua' dan Ponrang dulunya domain kecil dan secara strategis tidak penting yang terletak di pesisir sebelah selatan Palopo. Baebunta adalah sebuah domain dekat Masamba yang mengendalikan jalur dari Sa'bang menuju lembah Rongkong. Sebagian besar kekayaan Baebunta berasal dari perdagangan yang melewati jalur ini, antara pantai dan lembah Seko yang subur, terletak di pedalaman pegunungan Sulawesi Tengah. Masyarakat setempat mengklaim bahwa Baebunta pernah menjadi rival Luwu sebelum menjadi bagian darinya.²⁸ Apa yang digambarkan *Meaning and Power* sebagai "wilayah utama" nyatanya hanyalah tiga nama pertama yang disebut dalam Daftar Daerah Bawahan Luwu abad 15.²⁹ Sisa tujuh belas domain, yang ternyata tidak dapat diingat oleh informan penulis, diasumsikan sebagai 'wilayah yang lebih rendah'. Braam Morris menyebutkan enam belas domain (*landschap*) yang bersama Palopo membentuk Kerajaan Luwu pada akhir abad 19.³⁰

Sebuah contoh mencerahkan mengenai begitu mudahnya penulis memperlakukan bukti yang berlawanan dengan model 'pusat panutan' dapat dilihat dalam ulasannya mengenai arajang atau benda pusaka Luwu. 'Meskipun saya sudah tahu sebelum berangkat ke Luwu mengenai pentingnya benda pusaka ... yang belum jelas bagi saya adalah bahwa sebagian arajang "istana" berada di luar wilayah pusat.' (hl. 124) Fakta ini—bahwa benda pusaka tidak hanya ada di pusat tetapi bertebaran di berbagai tempat—secara langsung bertentangan dengan model 'sentris' *Meaning and Power*. Kita hanya bisa mengagumi kecerdikan penulis dalam menafsir arajang daerah sebagai "pengikat" (*placeholders*) bagi jabatan dan tanggungjawab yang dianugerahkan oleh sang penguasa, sebuah langkah yang memungkinkan penulis menawarkan sebuah model pusat-pusat daerah yang lebih kecil, yang diciptakan (dan diasumsikan dikendalikan) oleh pusat. "Pengikat" ini, menurut klaim penulis, dikeluarkan oleh penguasa pusat bagi para pejabat politik yang dia tunjuk. Sebagian dikeluarkan bagi para anggota 'lingkar dalam' yang merupakan anggota keluarga istana pusat, semisal patron penulis, Opu Pa'Bicara, sementara sebagian lainnya dikeluarkan untuk *arung lili*, bangsawan lokal atau daerah. Keping-keping daerah ini, 'dianggap sebagai aspek kurang penting atau kepingan dari arajang Luwu, benda pusaka pusat.' Kita membaca bahwa para bangsawan lokal, 'yang sama-sama menjadi penghuni pusat bersama arajang' datang dan pergi, tetapi 'arajang lokal tetap bertahan. Keberadaan mereka meletakkan pusat dan sub-sub pusat dalam ruang geografis,

²⁷ Macknight, C.C., "The Rise of Agriculture in South Sulawesi Before 1600", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17 (1983): 92-116.

²⁸ Saya berterimakasih kepada Ian Vail atas informasi ini.

²⁹ MS. NBG 100, Leiden University Library, hl. 63.

³⁰ Braam Morris, "Landschap", hl. 499.

mengikat tempat-tempat yang membentuk akkarungeng, menyediakan keberlanjutan dari masa ke masa” (hl 124-129).

Satu-satunya bukti yang diajukan penulis bagi teori ‘pengikat’ nya (selain dari komentar-komentar informannya) adalah klaim Heine-Geldern bahwa di Sulawesi Selatan yang berkuasa sebenarnya adalah regalia.³¹ Heine-Geldern tidak mengajukan bukti apa pun bagi apa yang dia sebut sebagai ‘konsepsi aneh’ itu (perlu diingat bahwa anggapan ini sangat disukai Belanda, yang sampai 1930-an memegang benda pusaka beberapa kerajaan Sulawesi Selatan!). Tetapi daftar domain pembentuk kerajaan (dan daftar kampung-kampung pembentuk domain) yang diwariskan kepada kita menyarankan bahwa masing-masing domain merupakan sebuah unit politik sendiri, ketimbang sebuah pemerintahan administratif bentukan pusat, sebagaimana diisyaratkan *Meaning and Power*. Lebih memungkinkan bahwa regalia yang ditemukan di daerah-daerah ini merupakan bagian dari tradisi kepenguasaan mereka sendiri, ketimbang stempel kerajaan yang dikeluarkan oleh Datu Luwu, sebuah praktik yang tidak punya bukti.

Benda pusaka Luwu sendiri nyatanya disebutkan dalam sebuah kumpulan tradisi lisan yang memuat empat generasi pertama keluarga penguasa Luwu.³² Bagian pembuka berbunyi:

Ini memulai tulisan tentang seseorang yang turun, Simpursia. Ini menceritakan hal-hal yang turun bersama dia dari Botillangi’ [dunia atas] dan hal-hal yang mencuat dari Peretiwi [dunia bawah], dan perbuatan seluruh penguasa.

Pendahuluan ini kemudian menyebutkan tiga benda pusaka yang diturunkan bersama Simpursia, pendiri legendaris dinasti penguasa Luwu (bukan Batara Guru sebagaimana dalam sebagian silsilah buatan abad ke 20, yang secara membingungkan menggabungkan dua tradisi lebih awal). Potongan cerita (*pericope*) kedua dan ketiga, yang dapat ditemukan dalam terjemahan Belanda,³³ menjadi catatan bagi kepemilikan benda-benda magis oleh keluarga istana Luwu, termasuk sejumlah alat perkusi yang digunakan oleh para ahli ritual calabai (*transvestite*) (gambar 1, 15 dan 16 dalam atlas etnografi Matthes).³⁴ Tidak satu pun cerita ini yang menekankan regalia atau benda magis lainnya sebagai ‘pusat’ kekuasaan. Melainkan, mereka berperan sebagai ‘tanda-tanda status’³⁵ yang dihadiahkan kepada garis penguasa Luwu oleh para penguasa tiga alam dalam kosmos Bugis pra-Islam: Botillangi’ (dunia atas) Kawa (bumi) dan Uriliung (dunia bawah).

³¹ Heine-Geldern, R., *Conceptions of Slate and Kingship in Southeast Asia* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program Data Paper No. 18, 1956), hl. 10.

³² MS NBG 127, Leiden University Library, hl. 41-45.

³³ Kern, "Boegineesche scheppingsverhalen", in *Feestbundel uitgegeven door net Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan, 1778-1928* (Weltevreden: Legatum Warneranium, 1929).

³⁴ Matthes, B.F., *Boegineesch-Hollandsch woordenboek, met Hollandsch-Boegineesche woordenlijst, en verklaring van een tot opheldering bijgevoegden ethnographischen atlas* (Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1874).

³⁵ Cf. Anderson, "Power", hl. 13-19.

Kesimpulan

Penulis telah mengerjakan tugas berharga, namun sayangnya kesimpulan bukunya tidak menepati apa yang dia janjikan. Jumlah peneliti sejarah yang meneliti Sulawesi Selatan dapat dihitung jari, dan sebuah kajian dengan ukuran dan cakupan seperti ini bisa sangat menarik perhatian. Sungguh tidak menyenangkan untuk mengatakan bahwa *Meaning and Power* adalah sebuah buku yang mengecewakan. Kelemahan utamanya berada pada metode: ketimbang mengikuti prosedur historis yang sistematis (yang dapat rangkum sebagai pencarian kepustakaan, pengumpulan data, pemeriksaan data berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan, menguji model-model penafsiran, analisis data dan penarikan kesimpulan historis) penulis memungkinkkan model negara terIndianisasi, mandala, yang memilih dan menafsir data. Penggunaan data oleh penulis semakin dilemahkan oleh pengetahuannya yang lemah akan geografi politik Luwu. Hasilnya, *Meaning and Power* tidak banyak membantu menjelaskan masa lalu Luwu.